SOCIO HISTORICA
Journal of Islamic Social History

Artikel

Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Krisis Beras di Pulau Jawa Tahun 1918-1921

Ahmad Ibrahim Zuhad[1]

[1] Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
* E-mail: aizkun24@gmail.com

Citation: Zuhad, A, I. " Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Krisis Beras di Pulau Jawa Tahun 1918-1921". *Socio Historica* **2024**, Vol. 3, No. 1. DOI https://doi.org/10.15408/sc.v3i1.38725

Publisher's Note: Socio Historica stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This research discusses the rice crisis on the island of Java from 1918 to 1921. The aim of this research is to explain how rice distribution in society, the perceived impacts, and the policies set by the colonial government of the Dutch East Indies during the rice crisis on the island of Java from 1918 to 1921. This research uses historical research methods, economic approaches, and the theory of people's economics by Hatta. The rice crisis on the island of Java from 1918 to 1921 occurred due to several factors including the aftermath of World War I, obstacles in the Export- Import routes, and natural conditions that disrupted rice management. This led to an increase in rice prices and an imbalance in distribution, impacting the economic and social conditions of Javanese society, including increased criminal activities such as theft and smuggling practices, as well as poverty spreading in the community. The Dutch East Indies government took policy measures to address the rice crisis, including rice stock limitations, rice export bans, rice imports, alternative food for the people, and rice price regulations. These policies, however, proved to be detrimental to the people as they were made solely for the welfare of the government*

Keywords: Rice Crisis, Dutch East Indies, Java, Colonialism, Dutch East Indies Government

Abstrak: Penelitian ini membahas krisis beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana distribusi beras di masyarakat, dampak yang dirasakan serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda saat krisis beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, pendekatan ekonomi dan teori ekonomi kerakyatan oleh Hatta. Krisis beras di Pulau Jawa pada tahun 1918-1921 terjadi karena beberapa faktor diantaranya akibat Perang Dunia ke-1, hambatan dalam jalur Ekspor-Impor, serta kondisi alam yang membuat pengelolaan beras terganggu. Hal ini menyebabkan kenaikan harga beras dan ketidakseimbangan distribusi yang berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Jawa diantaranya kriminalitas seperti pencurian dan praktek penyelundupan serta kemiskinan yang merambah di masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menangani krisis beras, diantaranya adalah pembatasan stok beras, larangan ekspor beras, impor beras, pangan alternatif untuk masyarakat, dan penetapan harga beras. Kebijakan-kebijakan ini nyatanya merugikan masyarakat karena kebijakan yang dibuat hanya untuk kesejahteraan pemerintah saja.

Kata Kunci: Hindia Belanda, Kebijakan pemerintah, Kolonialisme Belanda, Krisis Beras, Pemerintah Hindia Belanda

1. Pendahuluan

Salah satu peristiwa ekonomi yang terjadi di Hindia Belanda adalah krisis beras pada tahun 1918-1921. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yang kemudian membuat sawah-sawah yang ada menjadi gagal panen. Dalam buku *De Rijstinvoer in Nederlandsch-Indië* [1] yang ditulis oleh M.B. Smits pada tahun 1928, telah termaktub bahwa krisis beras telah terjadi sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 1921. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang kemudian menjadi sebab terjadinya krisis, salah satunya adalah faktor alam.

Sejak dulu, beras telah menjadi sumber pangan primer bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada masa lalu mulai menanam padi dengan menggunakan pengairan atau sekarang lebih dikenal dengan sawah.[2] Bertani di masa lalu merupakan salah satu kegiatan penting masyarakat sehingga masyarakat Indonesia bisa dikatakan masyarakat agraris yang menganggap bahwa tanah adalah aset penting dalam berkehidupan selain air. Kedudukan tanah bagi masyarakat agraris berfungsi sebagai salah satu tempat produksi beras yang juga menjadi salah satu faktor menghasilkan komoditas pangan. Ketika masa kerajaan Majapahit telah dilakukan ekspor beras, tujuan dilakukannya kebijakan ini adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, bukan berarti karena terdapat kebijakan ekspor beras menandakan bahwa produksi beras yang melimpah dan tidak pernah terjadi kelaparan pada rakyatnya.[3] Pada abad ke-17 sampai abad ke-18 wilayah Nusantara menjadi salah satu faktor perkembangan perdagangan internasional, hal ini karena wilayah nusantara menghasilkan komoditas pangan seperti rempah-rempah dan beras. Saat itu nusantara yang sistem perdagangannya dikuasai oleh VOC menjadikan padi sebagai komoditas ekspor penting. Sekitar tahun 1790-an terdapat instruksi dari VOC di Batavia bahwa para residen harus mengingatkan para petani untuk mengerjakan sawah lebih awal. Di tahun 1800 terdapat data yang menyebutkan bahwa semua petani harus membayar pajak dengan bentuk padi. Padi merupakan upeti yang dituntut Kompeni kepada bupati.

Ketika Perang Dunia ke-1 terjadi, walaupun pada saat itu Belanda belum ikut terlibat dalam perang, namun karena Belanda memiliki kerjasama di bidang ekonomi dengan Jerman membuat Inggris memblokade seluruh pelabuhan milik Belanda, sehingga kejadian ini berdampak pada Nusantara salah satunya di sektor pangan, seperti di akhir tahun 1917 terjadi perpanjangan penutupan pelabuhan menyebabkan impor beras dari Burma dan Indo-China tidak dapat dilakukan, selanjutnya di tahun 1918 musim kering melanda yang berakibat keterlambatan panen, kemudian selain di daerah Siam semua pasar beras di wilayah Asia Tenggara ditutup, kebijakan ini dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menjaga persediaan pangan. Tidak hanya itu, saat itu terjadi peningkatan jumlah penduduk secara drastis yang tidak bisa diimbangi dengan persediaan pangan yang cukup. Sehingga hal ini mendorong untuk memperluas daerah penanaman padi.[4]

[1] M.B. Smits, *De Rijstinvoer in Nederlandsch-Indie* (Weltevreden: Departement van Landbouw, 1928), 3.

[2] P.J Zoetmulder, *Kalangwan : Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang* (Jakarta: Djambatan, 1983).

[3] Khudori, *Ironi Negeri Beras* (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), 7.

[4] Kees van Dijk, *The Netherlands Indies and The Great War 1914-1918* (Leiden: KITLV Press, 2007), 357–361.

Impor beras telah terjadi di Hindia Belanda sejak abad ke-19, dan dalam buku *De Rijstinvoer in Nederlandsch-Indië*, data impor beras dari tahun ke tahun semakin meningkat yang artinya beras merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat di Hindia Belanda. Beras sebagai bahan pangan primer sangat dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat Hindia Belanda terutama masyarakat pribumi pada saat itu sehingga kebutuhan beras semakin meningkat maka kuantitas impor beras yang dilakukan juga semakin tinggi. Impor beras sejak tahun 1890 sampai tahun 1918 terus menerus meningkat.[5]

Dalam bukunya, M.B Smits menjelaskan tentang krisis beras yang terjadi dari tahun 1918 hingga 1921, yang secara signifikan mempengaruhi impor beras ke Hindia Belanda. Pada tahun 1919 dan 1920, terjadi penurunan drastis dalam kegiatan impor beras, yang disebabkan oleh krisis beras yang dimulai pada tahun 1918. Namun, pada tahun 1921, terjadi peningkatan impor beras yang signifikan. Jumlah impor beras pada tahun tersebut mencapai 748.905 ton untuk Hindia Belanda secara keseluruhan, dengan sebagian besar impor, yakni sebanyak 570.042 ton, terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Madura.[6]

Krisis beras di Pulau Jawa dapat dipahami sebagai hasil dari struktur ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Massa pribumi, yang merupakan mayoritas penduduk, terjebak dalam posisi tertekan di stratum terbawah dalam struktur sosial-ekonomi. Mereka menjadi rentan terhadap praktik ekonomi yang merugikan seperti transaksi terkait yang bersifat eksploitatif dan praktik perdagangan yang dipaksa oleh pedagang perantara.

Analisis ini memberikan pandangan tentang bagaimana krisis beras tidak hanya merupakan masalah ekonomi, tetapi juga fenomena sosial yang berakar pada ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat kolonial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap krisis tersebut memerlukan pemikiran yang melampaui aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhitungkan dinamika sosial dan politik yang terkait.

Penelitian ini dapat membantu untuk memahami apa dampak sosial dari krisis beras tersebut, termasuk konsekuensi dari ketidakstabilan politik, dan ekonomi serta dampaknya pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemahaman ini dapat memberikan perspektif yang berharga untuk menangani krisis pangan atau krisis ekonomi serupa yang mungkin terjadi pada masa sekarang.

Terakhir, melalui pemahaman tentang pengelolaan beras pada masa kolonial tersebut, kita dapat mengevaluasi kebijakan dan praktik pengelolaan pangan saat ini. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana strategi pengelolaan pangan masa lalu berhasil atau gagal, dan bagaimana kita dapat belajar darinya untuk meningkatkan kebijakan dan praktik saat ini dalam menghadapi tantangan pangan yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masa lalu, tetapi juga memiliki implikasi yang relevan untuk pembuatan kebijakan dan praktek saat ini dalam mengelola krisis pangan dan memastikan keberlanjutan pangan di masa depan.

2. Metode Penelitian

[5] M. B. Smits, *De Rijstinvoer In Nederlandsch-Indie* (Weltevreden: Landsdrukkerij, 1928), 3.

[6] Ibid., 3–4.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, yaitu sebuah metode yang dimulai dari proses mengumpulkan sumber penelitian (heuristik), kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun sumber sejarah sendiri umumnya terbagi menjadi dua, primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini berupa arsip Departemen Agama RI yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta laporan harian Badan Koordinasi Intelijen Indonesia (BAKIN). Sumber primer yang lain berupa arsip harian nasional yang terdapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Salemba yang terdiri dari arsip *Harian Pelita, Harian Kompas, Sriwijaya Post, dan Majalah Tempo*. Adapun sumber sekunder peneliti dapatkan dari buku-buku di perpustakaan yang berkaitan dengan subyek bahasan penelitian. Dokumen diperiksa secara kritis dan dianalisis sebagai bagian dari proses penelitian sejarah; dokumen dan arsip masa lalu. Pada penelitian sejarah dengan judul "Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Krisis Beras di Pulau Jawa Tahun 1918-1921" menggunakan metode historis : Heuristik, Verifikasi (kritik sumber), Interpretasi, dan Historiografi.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan ekonomi untuk menganalisis krisis beras yang terjadi di Pulau Jawa antara tahun 1918 hingga 1921. Melalui pendekatan ini, kami mengamati bagaimana peristiwa ekonomi krisis beras mempengaruhi kehidupan masyarakat di Pulau Jawa, serta kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis tersebut.

Konsep ilmu ekonomi yang diperkenalkan oleh Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai studi mengenai perilaku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku individu atau kolektif dalam masyarakat, dengan tujuan mencapai kemakmuran. Kemakmuran diartikan sebagai keadaan dimana kebutuhan material dapat terpenuhi secara optimal.[7]

Dalam penelitian ini, pendekatan ekonomi digunakan untuk mengkaji dampak krisis beras di Pulau Jawa selama periode 1918-1921 terhadap masyarakat, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi krisis tersebut melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Krisis beras di Pulau Jawa menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti kelangkaan beras di beberapa wilayah dan praktik-praktik penyalahgunaan beras yang merugikan masyarakat, mengingat beras merupakan bahan pangan utama di Jawa. Pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah kebijakan untuk merespons krisis beras. Oleh karena itu, penulis memilih pendekatan ekonomi dalam penelitian ini untuk menggambarkan peristiwa krisis beras di Pulau Jawa pada periode 1918-1921, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasinya.

3. Hasil dan Pembahasan

Krisis beras yang melanda wilayah-wilayah strategis di Hindia Belanda, terjadi di kota-kota besar salah satu yang terdampak adalah Bandung yang merupakan bagian dari Keresidenan Priangan. Louis de Stuers adalah Residen yang menjabat pada 1917-1920, kemudian pada tahun 1920-1921 digantikan oleh Willem Pieter Hillen. Krisis beras yang terjadi tentunya sangat berdampak terhadap jalannya perekonomian dan hubungan sosial

[7] Muhammad Dinar and Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi : Teori Dan Aplikasi* (Sulawesi Selatan: Pustaka Taman Ilmu, 2018), 2.

masyarakat pada saat itu. Keadaan tersebut telah dengan jelas tertulis dalam salah satu artikel koran Belanda. Artikel tersebut menarasikan dengan jelas terkait kelangkaan beras di Bandung pada tahun 1919. Situasi ini terasa sangat jelas di tengah-tengah masyarakat. Hal ini lalu berimbas hingga beberapa pengusaha-pengusaha besar dengan secara terpaksa membagikan beras kepada para pekerjanya secara cuma-cuma untuk mengatasi krisis pangan yang sedang berlangsung.[8]

Penting untuk dicatat bahwa telah terjadi perubahan signifikan dalam pola konsumsi pangan, di mana beras telah digantikan oleh singkong dan jagung sebagai bahan makanan utama yang lebih dominan di pasar. Perubahan ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kelangkaan beras dengan mencari alternatif yang lebih tersedia. Pergeseran ini menciptakan gambaran tentang dinamika perubahan gaya hidup dan pola makan masyarakat sebagai respons alami terhadap krisis pangan yang dihadapi. Tindakan pencegahan pemerintah, seperti penyediaan hanya beras siam mulai Oktober, bertujuan untuk mencegah kerusakan stok dan menunjukkan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga ketersediaan beras yang terbatas.

Berbeda dengan situasi di Majalengka, masyarakat di sana mengalami kekurangan pasokan beras di pasar. Dalam laporan dari Sinar Hindia yang diterbitkan pada 24 Februari 1919, disebutkan bahwa sejak Sabtu, 1 Februari 1919, di Pasar Radjagaloeh, hampir tidak ada penjual beras. Salah satu pedagang beras, Boe Sena, telah berhenti menjual beras karena pasokan dari daerah Cirebon telah terputus. Untuk mengatasi hal ini, Asisten Wedono Radjagaloeh hadir di pasar setiap pagi pukul tujuh, memastikan bahwa jika ada sedikit pun penjual beras, pasokannya akan didistribusikan secara adil kepada masyarakat.

Pada Senin, 3 Februari 1919, situasinya semakin memburuk ketika tidak ada penjual beras di pasar hingga siang hari. Asisten Wedono kemudian berusaha mencari beras dan akhirnya menemukan satu orang dari desa lain yang membawa 60 kati beras untuk dijual. Beras tersebut kemudian dibagikan secara merata kepada pembeli yang membutuhkannya. Asisten Wedono juga menginstruksikan pedagang beras di pasar untuk melaporkan kekurangan pasokan kepada Asisten Residen Majalengka, R.A.A. Sosroningrat, dan meminta pengiriman beras dari Cirebon.[9]

Pada persidangan Volksraad tanggal 9 Juli 1921, Tuan Cramer melaporkan bahwa kondisi tanaman padi di berbagai wilayah, khususnya Jawa dan Madura, lebih buruk daripada yang tercantum dalam Majelis van Adat (M..A.). Terdapat 410.080 batang tanaman padi yang tidak berkembang sepenuhnya, mencakup 14,8 persen dari total tanaman padi sebanyak 2.773.000 batang.[10]

Angka-angka tersebut menggambarkan tingkat kerugian yang signifikan, terutama di beberapa daerah seperti Surabaya (44,5 persen), Kediri (34,5 persen), Cirebon (28,9 persen), dan Madiun (22,9 persen). Wilayah lain seperti Banten, Madura, Rembang, dan Semarang juga mengalami kerugian antara 10 hingga 20 persen. Pada akhir bulan Mei, tambahan kerugian mencapai 69.000 batang, menambahkan 5 persen dari sebelumnya. Surabaya menghadapi ancaman serius dengan separuh dari tanaman padi, sekitar 60.000

[8] "Rijst-Schaarschte," *Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indie* (Batavia, December 9, 1919), 2.

[9] "Riboet Koerang Beras," *Sinar Hindia* (Semarang, February 24, 1919), 1.

[10] "Volksraad Persidangan Sabtu 9 Juli," *Neratja* (Batavia, July 16, 1921).

batang, terancam mati. Sementara di tempat lain, tingkat ancaman hanya sekitar 10 persen, dengan Cirebon dan Kediri memiliki tingkat ancaman sebesar 10,1 persen. Direktur menjelaskan bahwa kerusakan ini disebabkan oleh serangan hama "omo mentek", yang berkembang subur karena cuaca buruk, kabut asap, dan fluktuasi air yang tiba-tiba. Jumlah padi yang tidak berkembang tahun ini diperkirakan mencapai 11.876.000 pikul, meningkat secara signifikan dari tahun 1920 yang hanya sekitar 4.339.919 pikul[11]

Kerusakan yang terjadi pada tahun 1921 juga mencatatkan angka yang mengkhawatirkan: Surabaya mengalami kerugian sebanyak 3.997.000 pikul, Kediri 1.332.000 pikul, Cirebon 1.392.000 pikul, dan Madiun 1.021.000 pikul. Jumlah padi yang mati tahun ini melebihi 7.500.000 pikul dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data di atas menjadi cerminan betapa akumulasi dari berbagai faktor pada akhirnya semakin memperburuk produksi beras dan berdampak pada semakin menderitanya masyarakat di sebagian besar Pulau Jawa.

Disisi lain, krisis beras yang menghantam Kawedanan Tengelis, Semarang, telah mendorong pemerintah setempat untuk segera mencari solusi guna mengatasi kendala stok beras yang semakin menipis dan tidak mencukupi kebutuhan rakyat. Dalam menghadapi tantangan ini, inisiatif unik diambil dengan mengajak penduduk setempat untuk beralih ke konsumsi nasi campur singkong sebagai alternatif makanan pokok. Langkah ini mencerminkan upaya kreatif dan adaptasi dalam menghadapi kesulitan yang melanda.[12]

Peristiwa lain mengenai dampak yang terjadi akibat krisis beras di wilayah Jawa Tengah juga terjadi di pasar Djebres pada tahun 1918. Disebutkan dalam salah satu berita pada surat kabar Sinar Hindia bahwa surat kabar Nieuwe Vorstenlanden di Solo mewartakan seorang perempuan menjual dua anak laki-lakinya, pertama anaknya yang berumur satu setengah tahun yang dihargai 50 sen dan anaknya yang lain berumur tiga tahun dihargai 80 sen. Dalam laporannya Sinar Hindia menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena kondisi dimana harga makanan sangat mahal sehingga banyak orang mengalami kemelaratan, apalagi harga beras yang pada saat itu sudah mulai melambung tinggi sehingga masyarakat tidak dapat membeli beras untuk makan sehari-harinya.[13]

Peristiwa serupa juga terjadi di wilayah Klaten, sebagaimana dilaporkan dalam surat kabar Sinar Hindia. Di pasar-pasar di daerah Klaten, setiap hari terlihat beberapa puluh anak kecil dari desa-desa yang tampaknya telah diasingkan oleh orang tua mereka. Banyak di antara mereka telah dijual dengan harga berkisar antara 0,75 hingga 1 gulden per anak. Keadaan ini mencerminkan tragedi sosial yang dalam, dimana tekanan ekonomi yang tak tertahankan mendorong orang tua untuk mengambil langkah ekstrem demi kelangsungan hidup keluarga mereka. Keberadaan anak-anak yang terlantar di pasar menjadi simbol dari keputusasaan yang melanda masyarakat di tengah-tengah krisis pangan yang mengguncang. [14]Beberapa orang yang membeli anak-anak yang dijual memberikan alasan yang menyentuh hati. Mereka tidak hanya tergerak oleh penampilan fisik anak-anak yang sangat kurus dan wajah yang memperlihatkan penderitaan, tetapi juga oleh pemahaman bahwa orang tua yang menjual anak-anak mereka terjerumus dalam kemiskinan, kesulitan ekonomi, dan ketidakmampuan untuk memberikan

[11] *Ibid*.
[12] "In Dagen van Rijstschaarschte," *De Locomotief* (Semarang, January 24, 1919).
[13] "Melarat Sangat," *Sinar Hindia* (Semarang, December 12, 1918), 2.
[14] "Djoeal Anak," *Sinar Hindia* (Semarang, Desember 1918).

makanan. Para orang tua yang mengambil langkah ekstrem ini tidak tahan melihat anak-anak mereka menderita kelaparan, dan juga karena keterbatasan finansial yang akan membuat proses pemakaman anak yang meninggal menjadi sangat sulit jika tidak ada uang yang cukup untuk biaya penguburan. Keadaan ini menggambarkan betapa parahnya tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat pada masa itu, sehingga menyebabkan tindakan yang penuh dengan keputusasaan dan penderitaan.[15]

Dalam laporan yang diterbitkan oleh surat kabar Sinar Hindia pada tanggal tujuh Januari 1919, tergambar betapa negeri Hindia Belanda berada dalam ancaman serius yang disebut "Kemahalan Barang Makanan". Laporan tersebut menyatakan bahwa harga bahan makanan, khususnya beras, telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dengan fokus utama pada daerah Pekalongan. Bagi masyarakat pribumi, beras merupakan bahan makanan utama, dan sejak akhir tahun 1918, harga beras telah melonjak secara signifikan, menimbulkan penderitaan terutama bagi masyarakat Kromo.

Di Pekalongan, lonjakan harga beras mencapai puncaknya pada tanggal 24 Desember 1918, dengan harga mencapai 19 Gulden per pikul. Sementara itu, dalam keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 1918, harga beras yang ditetapkan untuk berbagai jenis, seperti beras Rangoon Sloka seharga 11,50 Gulden per pikul, beras Menir A.I dengan harga yang sama, dan beras Saigon seharga 12,00 Gulden per pikul. Namun, kebanyakan penjual beras enggan mematuhi keputusan ini dengan alasan bahwa menjual beras dengan harga yang telah ditetapkan akan mengakibatkan kerugian, karena mereka membeli beras dengan harga yang sama tingginya. Situasi ini mencerminkan kompleksitas dan ketegangan antara kebijakan pemerintah dan praktik perdagangan di lapangan pada masa itu.[16]

Laporan koran Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indie melaporkan adanya keluhan dari penjual beras Tionghoa yang telah dilaporkan ke Polsek Pendjaringan terkait perilaku delapan pemilik warung Tionghoa. Mereka dituduh menolak menjual beras meskipun memiliki stok yang cukup. Penerbitan berita ini dipandang sebagai langkah yang positif dalam upaya memberantas praktik yang merugikan masyarakat. Berita ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan beras, serta peran yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum dalam menangani pelanggaran.[17]

Berita tersebut menggarisbawahi bahwa kasus tersebut hanya merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang timbul saat terjadi kekurangan beras. Dari analisis yang lebih mendalam, terlihat ada kemungkinan perlunya tindakan yang lebih tegas untuk memastikan kepatuhan para pedagang beras yang curang. Pihak kepolisian mengusulkan untuk menutup lembaga tersebut untuk sementara waktu sebagai bentuk hukuman, bahkan jika pelanggarannya adalah yang pertama kali. Jika pelanggaran tersebut terus terjadi, maka kepolisian akan menerapkan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya, termasuk penahanan barang yang disita.

Langkah-langkah ini mencerminkan keinginan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kecurangan. Dengan mengambil tindakan yang lebih keras, diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan transparan, serta melindungi

[15] *Ibid*.

[16] "Bahaja Kemahalan," *Sinar Hindia* (Semarang, January 7, 1919), 2.

[17] "De Rijst-Schaarschte," *Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indie* (Batavia, June 11, 1919).

kepentingan masyarakat secara keseluruhan.[18] Koran lain mengkritisi bahwa denda yang diberlakukan saat ini tidaklah efektif untuk menghentikan praktik yang merugikan masyarakat. Para pedagang beras lebih cenderung memperoleh keuntungan yang lebih signifikan daripada nilai denda yang diberlakukan. Denda yang dianggap terlalu kecil tidak memberikan ancaman serius bagi mereka. Oleh karena itu, dengan memberlakukan tindakan yang lebih keras, diharapkan para pemilik warung akan lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam praktik mereka.

Dinamika pasar beras di Hindia Belanda selama masa krisis tercermin dari kebijakan pembelian padi dari penduduk dan perbedaan harga antara beras lokal dan impor. Meskipun pemerintah membeli 6 juta pikul padi dari masyarakat dengan harga pokok yang dinaikkan maksimum 40 sen per pikul, tingkat penjualan di bawah harga tersebut berlangsung berbulan-bulan di seluruh wilayah. Situasi ini semakin kompleks dengan pembelian beras asing dengan harga pasar yang tinggi, sementara di Jawa, beras ini dijual kepada penduduk ibu kota dengan harga maksimal 20 per pikul, yang juga menjadi standar tertinggi di daerah pelosok. Perbedaan harga ini menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan di berbagai wilayah, yang tampak melibatkan praktik spekulasi dan pengangkutan beras secara sembunyi-sembunyi yang merugikan banyak pihak. Meskipun upaya pencegahan dilakukan, seperti penyitaan 26.000 pikul beras di Solo yang dianggap terlalu mahal, masih ada kendala dalam mencegah pengangkutan beras secara klandestin. Keputusan untuk menjaga ketat perbatasan berbagai ibu kota adalah respons nyata terhadap praktik-praktik ini.

Pada Juli tahun 1921, Residen Surabaya, Ir. G.J. Dijkerman diberi izin oleh Direktur Landbouw untuk menggunakan dana sebesar 125.000 gulden untuk pembelian bibit padi. Dana ini dimaksudkan untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak krisis di Karesidenan Surabaya. Keputusan ini mencerminkan respons pemerintah terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian warga di wilayah tersebut. [19]Pentingnya membantu masyarakat yang menderita dengan menyediakan bibit padi menandakan upaya untuk memperbaiki ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Pembelian bibit padi dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut. Selain itu, berita lain menyampaikan bahwa Residen juga diberi wewenang untuk menggunakan dana sebesar 75.000 gulden untuk tujuan yang sama.

Pada bulan November 1919, dalam laporan Bataviaasch Nieuwsblad, kekhawatiran perlahan terus merayap di tengah masyarakat menyusul penangkapan dua individu pribumi yang tinggal bersama di daerah dataran tinggi oleh pihak kepolisian. Tersangka diduga terlibat dalam perbuatan menggelapkan satu karung beras, suatu tindakan yang tidak hanya mencemarkan reputasi mereka sendiri, tetapi juga merugikan sesama penduduk yang tinggal di Salemba.[20] Peristiwa ini menarik perhatian publik, khususnya di kalangan masyarakat Salemba. Keberanian dua tersangka dalam terlibat dalam aktivitas kriminal menciptakan keprihatinan dan kesedihan yang mendalam. Kondisi ekonomi di komunitas setempat juga terancam akibat dari tindakan tersebut, mengingat

[18] *Ibid*.

[19] "Membantu Rakyat," *Neratja* (Batavia, July 15, 1921), 5 edition.

[20] "De Rijstschaarschte," *Bataviaasch Nieuwsblad* (Batavia, November 22, 1919).

beras adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat esensial bagi warga setempat karena perannya sebagai bahan pangan utama.

Mundur ke 10 bulan sebelumnya, dalam artikel koran Sinar Hindia yang diterbitkan pada tujuh Januari 1919, disampaikan bahwa Hindia Belanda sedang menghadapi masalah "Kenaikan Harga Bahan Makanan". Menurut laporan tersebut, harga-harga bahan makanan, terutama beras, telah melonjak drastis, dengan fokus khusus pada wilayah Pekalongan. Bagi penduduk pribumi, beras merupakan bahan makanan pokok, dan sejak akhir tahun 1918, harga beras telah mencapai titik yang sangat tinggi, menyebabkan penderitaan terutama bagi masyarakat Kromo. Di Pekalongan, harga beras mencapai puncaknya pada tanggal 24 Desember 1918, dengan mencapai 19 Gulden per pikul. Laporan tersebut menyatakan bahwa banyak masyarakat Kromo tidak mampu lagi membeli beras, sehingga terpaksa hanya mampu membeli Singkong sebagai alternatif makanan sehari-hari. Bahkan, ada keluarga yang tidak mampu membeli Singkong, sehingga terpaksa harus mengandalkan Nggok nggok rat sebagai sumber makanan. Nggok nggok rat adalah sisa parutan Singkong yang diperas sarinya untuk digunakan dalam pembuatan batik, dan sisa dari proses tersebutlah yang kemudian dikonsumsi oleh orang- orang yang sudah tidak mampu lagi membeli Singkong.[21]

Selain kenaikan harga beras yang tinggi dan kemiskinan, tindak kriminal juga terjadi pada saat krisis beras. Dalam laporan Sinar Hindia yang terbit pada bulan Februari tahun 1919, di Kota Magelang hampir setiap malam kebanyakan rumah kedatangan maling. Mereka yang rumahnya kedatangan maling kehilangan ayam, kain dan utamanya adalah beras yang dicuri. Hal ini karena tingginya harga beras sebab orang-orang Cina yang menjual beras dengan harga yang sangat tinggi dengan tidak memandang kondisi yang terjadi pada penduduk. Bahkan dalam berita tersebut disebutkan orang-orang Cina yang menjual beras dengan harga tinggi itu dikatakan "tidak pikirlah sama sekali dengan keadaan lain orang". Keadaan ini yang salah satunya menyebabkan kemiskinan pada para penduduk.[22]

Kemudian, pada bulan Mei tahun 1921, ada 27 wagon beras yang hilang dari Banyuwangi menjadi sorotan, terjadi praktik penyelundupan yang semakin meresahkan masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, T.Wedono Rejogampi bersama Nurdin, seorang beamte S.S. Hulte Temuguruh, telah melakukan langkah-langkah untuk mengungkap keberadaan beras yang hilang.[23]Perjalanan T.Wedono Rejogampi dan Nurdin ke Kota Malang menghasilkan perkembangan signifikan. Mereka berhasil menangkap seorang pengirim beras yang diidentifikasi sebagai seorang Tionghoa bernama Liem Twam Long di Pare, Kediri. Liem Twam Long merupakan pengirim 3 wagon beras dari Halte Temuguruh[24]. Meskipun Liem Twam Long tidak mengaku, pendapatan penulis melaporkan bahwa ia akhirnya terkena hukuman denda sebesar 500 gulden. Meski demikian, satu wagon beras dapat memberinya keuntungan bersih sebesar 1000 gulden. Hal ini menciptakan situasi di mana beberapa individu mungkin bersedia mengambil risiko tinggi untuk mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan. Menurut laporan dari surat kabar Sinar Hindia pada 7 Januari 1919, Hindia Belanda sedang mengalami krisis "Kenaikan Harga Barang Makanan". Laporan tersebut mencatat bahwa harga-harga bahan makanan, terutama

[21] "Bahaja Kemahalan," 2.

[22] "Roedjak Woeni Dari Magelang," *Sinar Hindia* (Semarang, February 13, 1919), 2.

[23] "27 Wagon Beras Lari Dari Banyuwangi," *Neratja* (Batavia, May 30, 1921).

[24] *Ibid*.

beras, telah melonjak secara signifikan, terutama di daerah Pekalongan. Bagi masyarakat pribumi, beras merupakan komoditas makanan utama, dan sejak akhir tahun 1918, harga beras mencapai level yang sangat tinggi, yang menyebabkan penderitaan khususnya bagi masyarakat Kromo.[25]

Di Pekalongan, lonjakan harga beras mencapai puncaknya pada 24 Desember 1918, mencapai 19 Gulden per pikul. Meskipun pada 26 Desember 1918, pemerintah menetapkan harga beras Rangoon Sloka sebesar 11,50 Gulden per pikul, harga yang sama berlaku untuk beras Menir A.I, dan beras Saigon dihargai 12,00 Gulden per pikul. Namun, mayoritas pedagang beras enggan mematuhi keputusan pemerintah dengan alasan bahwa menjual beras dengan harga yang telah ditetapkan akan merugikan penjualan mereka, karena mereka membeli beras dengan harga yang tinggi pula.[26] Situasi ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang mengganggu masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada beras sebagai sumber makanan utama. Lonjakan harga beras telah memberikan dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat, memaksa mereka untuk mencari alternatif lain seperti singkong, dan bahkan sisa-sisa parutan singkong yang digunakan dalam pembuatan batik, yang disebut Nggok nggok rat, menjadi sumber makanan bagi yang tidak mampu.

Lonjakan harga beras juga terjadi di daerah Peterongan. Dalam laporan Sinar Hindia yang terbit tanggal 12 Februari 1919 dikatakan bahwa lonjakan harga beras yang terjadi di Peterongan disebabkan oleh saudagar- saudagar beras yang tidak menuruti aturan yang sudah ditetapkan oleh Regeering bahwa harga beras Siam nomor satu harganya adalah 16,50 Gulden per pikul ditambah 50 sen untuk harga pasar. Tetapi para saudagar beras tidak mematuhi aturan tersebut dan menentukan harga 'soeka-soeka nya sendiri'. Selain itu mereka melakukan penipuan dengan mencampur beras Siam dengan beras Menir, tapi campurannya lebih banyak daripada yang dicampur, yang artinya beras Siam setengah pikul dan beras Menir sebagai campurannya sebanyak satu pikul lalu dijual kepada pelanggan- pelanggannya. Karena peristiwa tersebut, di akhir berita ditulis peringatan jika hal tersebut tidak dicegah maka wilayah Peterongan akan banyak pencuri, bukan yang seperti maling, akan tetapi melakukan penipuan dalam penjualan beras.[27]

Informasi yang disampaikan juga menyoroti bahwa situasi di lereng barat Klot juga menunjukkan ketidakuntungan, dengan upah yang tidak mencukupi bagi penduduk setempat untuk membeli makanan dan bahan pangan yang semakin hari kian mahal. Masyarakat di wilayah ini yang sebagian besar terdiri dari kuli perusahaan, menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan karena kelangkaan beras lokal. Pasokan dari Surabaya, yang seharusnya menjadi penyelamat, nyatanya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesulitan pun semakin bertambah ketika sejumlah kebun singkong di Bendoredjo mengalami kerusakan akibat banjir.[28] Menteri Koloni menyampaikan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengambil langkah-langkah cepat yang diumumkan pada rapat tanggal 22 Desember 1919 untuk mengatasi kelangkaan beras. Langkah-langkah tersebut telah terbukti efektif dan dianggap perlu untuk dilanjutkan di masa mendatang. Salah satu langkah kunci yang diusulkan adalah mengurangi ketergantungan penduduk Jawa dan Madura pada beras asing dengan

[25] "Bahaja Kemahalan," 2.

[26] *Ibid*.

[27] "Beras Mahal," *Sinar Hindia* (Semarang, February 12, 1919), 1.

[28] "Duurte En Rijstschaarschte," *De Locomotief* (Semarang, January 25, 1918).

meningkatkan produksi beras lokal dan memperluas budidaya tanaman pangan lainnya, seperti malt dan singkong.[29]

Krisis beras terjadi pada tahun 1918-1921, peristiwa tersebut terjadi pada masa Gubernur Jenderal Johan Paul van Limburg Stirum. Tentu pada saat itu ada beberapa kebijakan yang dibuat untuk mencoba mengatasi krisis beras yang terjadi. Kelangkaan beras di Bandung semakin mencuat, menciptakan dampak yang signifikan pada masyarakat dan perekonomian. Dalam upaya mengatasi krisis ini, beberapa pengusaha besar telah memulai inisiatif membagikan beras kepada para pekerjanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Perubahan yang mencolok mulai terasa dalam pola konsumsi di pasar. Dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, singkong dan jagung kini menjadi komoditas yang lebih banyak diperjual-belikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Bahan makanan ini diandalkan pada masa krisis karena cadangan yang masih tergolong banyak dan harganya yang murah dibandingkan beras.

Pada Artikel koran De Locomotief tahun 1919,[30] memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana pemerintah merespons kelangkaan beras melalui strategi inovatif di tingkat lokal. Pemerintah mengajukan alternatif konsumsi bahan makanan dengan menyoroti campuran beras dan singkong sebagai solusi kreatif untuk mengatasi keterbatasan pasokan beras. Salah satu inisiatif yang diangkat adalah langkah yang diambil oleh Wedana Kecamatan Tengelis, divisi Kudu, wilayah Semarang. Mereka berhasil menggiring penduduknya untuk mengkonsumsi nasi campur singkong dengan porsi yang seimbang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengadaan pangan alternatif ini untuk mengurangi konsumsi beras di kalangan masyarakat agar stok beras bagi pemerintah tercukupi tanpa mempertimbangkan masyarakat miskin yang tidak dapat membeli beras.

Berita dari Batavia pada 29 Oktober 1919 menyampaikan gambaran yang mengkhawatirkan tentang meningkatnya kekurangan beras di wilayah Bandung. Kondisi ini telah menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat, yang sekarang khawatir bahwa panen berikutnya mungkin tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan luar. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah, melalui komentar dari Direktur Pertanian, mengusulkan beberapa strategi untuk mengatasi kekurangan beras yang semakin memburu.[31] Direktur Pertanian menyarankan agar langkah- langkah perlu diambil segera, mengakui bahwa meningkatnya kekurangan beras memerlukan solusi yang proaktif. Rekomendasi pertamanya adalah mengubah pola makan di toko makanan. Langkah ini dirancang untuk mengadaptasi pola konsumsi lokal dengan menggunakan bahan pangan yang lebih tersedia atau dapat ditanam di wilayah tersebut.

Pada tahun 1918, saat masa krisis beras banyak terjadi ketegangan yang terjadi di berbagai kecamatan di Divisi Tulungagung akibat kenaikan harga beras yang signifikan. Untuk mengatasi situasi ini, Asisten Residen mengusulkan beberapa langkah kebijakan yang dianggap penting. Adanya pemberian kredit sebesar 100.000 Gulden. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendapatkan sumber daya tambahan guna mengatasi krisis dan mengimplementasikan kebijakan yang diperlukan. Permintaan ini

[29] "Rijstschaarschte," *Bataviaasch Nieuwsblad* (Batavia, May 28, 1920).

[30] "In Dagen van Rijstschaarschte."

[31] "Voedselvoorziening," *Algemeen Handelsblad* (Rotterdam, November 8, 1919).

juga menyoroti urgensi dan skala masalah yang dihadapi oleh pemerintah setempat.[32] Usulan penerbitan larangan ekspor dan penyitaan stok beras yang dimiliki oleh orang Cina dan Haji dengan harga perkiraan merupakan strategi intervensi langsung pemerintah untuk mengendalikan harga beras. Langkah ini menciptakan langkah-langkah preventif untuk mengamankan pasokan beras bagi pemerintah dan mencegah penimbunan atau spekulasi harga yang tidak sehat karena para tengkulak yang curang. Penyitaan ini dilakukan untuk menjadi stok beras bagi Pemerintah Hindia Belanda.

Larangan ekspor beras ini muncul dalam Staatblad yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, yaitu Staatsblad tahun 1918 nomor 166 yang menerangkan mengenai larangan ekspor beras dari wilayah Jawa dan madura ke wilayah lain di Hindia Belanda. Karena stok beras yang ada di wilayah Jawa dan Madura sendiri pada waktu itu tidak mencukupi untuk wilayah tersebut, maka larangan ekspor beras ini terbit sebagai Staatsblad. Dalam Staatblad yang diterbitkan juga ada mengenai pelanggaran dalam larangan tersebut, yaitu yang melanggar larangan ekspor beras akan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan dan beras yang akan diekspor oleh pihak yang melakukan tindak pidana akan disita oleh pemerintah.[33]

Artikel di koran De Locomotief pada tahun 1918 juga memberikan wawasan tentang kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh penduduk, terutama kuli perusahaan. Tingkat upah yang tidak mencukupi untuk menyediakan makanan yang mahal menyoroti ketidaksetaraan ekonomi yang memperparah dampak krisis pangan. Selain itu, kondisi buruk di Bendoredjo akibat banjir memberitakan bencana alam yang memperburuk situasi. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya perlu mengatasi faktor ekonomi tetapi juga faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pasokan alternatif bahan makanan.[34] Dalam menghadapi tantangan kelangkaan beras, pemerintah telah mengambil langkah- langkah proaktif dan solutif untuk memastikan ketersediaan pangan di Pulau Jawa. Dalam sebuah pengumuman, pemerintah menyatakan akan segera memperoleh sekitar 350.000 pikul beras asing dengan tujuan utama untuk membantu daerah-daerah yang paling kekurangan beras. Langkah ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menanggapi kondisi darurat pangan. Sebagai respons terhadap kemungkinan kelangkaan, pengadaan beras asing dianggap sebagai tindakan preventif untuk mengamankan pasokan pangan dan mencegah terjadinya krisis pangan yang lebih besar. Keputusan pemerintah untuk mengalokasikan beras asing secara khusus untuk daerah yang paling membutuhkan menunjukkan pendekatan yang cerdas dalam penanganan krisis. Fokus pada daerah yang paling kekurangan beras bertujuan untuk memberikan bantuan yang efektif dan langsung kepada masyarakat yang terdampak.[35] Pemerintah Hindia Belanda juga mengadakan kebijakan dimana pihak yang menanam atau mempunyai tanaman padi untuk memberikan hasilnya kepada pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam Staatblad No. 82 tahun 1920 dimana Undang-undang tersebut mengatur pemberian sebagian hasil panen padi kepada pemerintah di Hindia Belanda merupakan suatu kebijakan yang menciptakan berbagai implikasi yang kompleks dalam berbagai aspek

[32] "Duurte En Rijstschaarschte."

[33] J. v. Limburg, "Staatblad van Nederlandsch-Indie No. 166" (De gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, March 30, 1918).

[34] "Duurte En Rijstschaarschte."

[35] "De Voedselvoorziening van Java," *De Indier* (Den Haag, May 1, 1918).

kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Undang-undang ini, yang terdiri dari Pasal satu hingga lima, menetapkan kewajiban bagi pemilik atau petani yang menanam padi di Pulau Jawa dan Madura untuk menyumbangkan sebagian hasil panennya kepada pemerintah, jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh pejabat yang ditunjuk. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi pidana penjara atau denda, sesuai dengan Pasal lima. Selain itu, undang-undang ini juga memperhatikan penentuan harga yang adil bagi pihak yang menyumbangkan hasil panen[36]

Dari segi sosial, undang-undang ini dapat mempengaruhi hubungan antara petani dan pemerintah. Kewajiban menyumbangkan sebagian hasil panen dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani jika mereka merasa bahwa kontribusi mereka tidak dihargai secara adil. Hal ini dapat mengakibatkan ketegangan sosial di masyarakat agraris seperti di Pulau Jawa dan Madura. Pada sisi ekonomi, undang-undang ini memiliki potensi untuk mengatur distribusi dan ketersediaan beras di pasar. Dengan menyumbangkan sebagian hasil panen kepada pemerintah, pemerintah memiliki kontrol lebih besar atas pasokan beras di wilayah tersebut. Namun, hal ini juga dapat mempengaruhi pasar lokal dan harga beras bagi konsumen akhir. Implikasi politik dari undang-undang ini adalah penguatan otoritas pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam mengatur ekonomi dan sumber daya alam di wilayah jajahannya. Pengambilan kebijakan yang memaksa petani untuk menyumbangkan hasil panen menunjukkan dominasi pemerintah kolonial dalam mengatur produksi pangan dan ekonomi lokal. Undang-undang pemberian gabah kepada pemerintah di Hindia Belanda menciptakan berbagai dampak sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.

Pada bulan Februari, Artikel dalam koran De Locomotief mencatat langkah-langkah signifikan yang diambil oleh pemerintah Inggris untuk mengatasi masalah pasokan beras di Hindia Belanda. Pengumuman resmi mengenai lisensi bulanan untuk ekspor 6.000 ton beras Rangoon menandai kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di wilayah tersebut. Dengan membagi ekspor antara pengiriman ke Hindia Belanda dan pengiriman langsung, pemerintah berusaha mengatur distribusi beras untuk mengoptimalkan ketersediaan di pasar lokal. [37]Dalam koran De Nieuwe vorstenlanden, diberitakan mengenai langkah-langkah signifikan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kekhawatiran dan ketakutan terhadap kelangkaan beras di Jawa. Kondisi ketidakpastian pasokan beras di pasar domestik menimbulkan kekhawatiran, dan pemerintah merespons dengan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan beras.[38]

Salah satu langkah yang mencolok adalah kebijakan penyimpanan stok darurat pemerintah. Dengan menetapkan cadangan sebesar 35.000 pikul beras dari luar negeri, pemerintah menunjukkan kesiapannya menghadapi kemungkinan kelangkaan. Stok darurat ini dapat dianggap sebagai jaminan strategis untuk memastikan ketersediaan beras dalam jumlah yang mencukupi, terutama dalam situasi darurat.[39] Selain itu, kebijakan impor beras secara eksklusif dari Bangkok menjadi langkah proaktif pemerintah. Sejak Februari, penerimaan pasokan beras dari sumber tersebut menciptakan kontinuitas pasokan yang diarahkan untuk mengatasi ketidakpastian dalam produksi lokal atau potensi hambatan impor dari sumber lain. Informasi tambahan dari telegram lokomotif menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengambil

[36] J. v. Limburg, "Staatblad van Nederlandsch-Indie No. 82" (De gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, 1920).

[37] "Rijst Voor Indie," *De Locomotief* (Semarang, August 2, 1918).

[38] "Rijstschaarschte," *De Nieuwe Vorstenlanden* (Semarang, May 2, 1918).

[39] *Ibid*.

tindakan cepat dengan menyetok beras luar negeri, tetapi juga berusaha memastikan kelangsungan pasokan dengan menerima pasokan berkelanjutan dari Bangkok. Ini mencerminkan strategi pemerintah untuk mengelola pasokan beras melalui waktu, mengurangi risiko gangguan dan menjaga ketersediaan yang stabil. Penyimpanan stok besar beras di berbagai gudang juga menciptakan infrastruktur yang diperlukan untuk distribusi yang efisien.

Pemerintah Hindia Belanda merespon kelangkaan beras dengan langkah- langkah yang diumumkan dalam rapat pada Desember 1919. Menteri Koloni menyatakan bahwa langkah-langkah ini terbukti efektif dan akan diteruskan di masa mendatang. [40]Sebagai solusi jangka panjang, Menteri Koloni mendorong penduduk Jawa dan Madura untuk menjadi lebih mandiri secara pangan. Peningkatan produksi beras lokal dan diversifikasi pertanian diusulkan sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada beras impor. Langkah ini mencerminkan strategi pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan dan mengatasi potensi kelangkaan masa depan.[41]Kebijakan penetapan harga maksimum untuk beras asli mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah kenaikan yang drastis. Dijelaskan bahwa harga maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi pasar lokal selama panen raya. Pembelian padi dari penduduk dengan harga yang ditetapkan dan penjualan dengan harga maksimum menjadi strategi untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau.

Ada perbedaan harga antara beras asli dan impor. Harga yang berbeda ini menciptakan tantangan terkait dengan spekulasi harga dan pengangkutan beras secara sembunyi-sembunyi. Pemerintah dihadapkan pada tugas untuk memastikan bahwa perbedaan harga ini tidak menimbulkan praktik-praktik yang merugikan dan merugikan stabilitas pasokan.[42] Dalam upaya mencegah pengangkutan beras secara sembunyi-sembunyi, pemerintah melakukan penyitaan stok beras yang dianggap terlalu mahal. Pengawasan ketat di perbatasan ibu kota juga diimplementasikan untuk mencegah aktivitas ilegal yang dapat merugikan pasokan dan harga beras.

Pengungkapan rencana pemerintah Hindia Belanda untuk menetapkan harga maksimum yang seragam untuk beras asli. Ini diharapkan akan menciptakan dasar harga yang konsisten dan terkontrol, mengurangi ketidakpastian dan spekulasi pasar. Dalam konteks pembelian kembali beras oleh penduduk, artikel memberikan klarifikasi bahwa ekspektasi pembelian kembali ini tidak selalu dapat diandalkan. Pemerintah menunjukkan ketersediaan dukungan jika harga yang ditawarkan tidak memadai, menegaskan komitmen untuk memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.

Berita yang diwartakan surat kabar Sinar Hindia pada Bulan Desember 1918, mencerminkan kekhawatiran mendalam terkait krisis pangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, mengakibatkan keputusan pemerintah untuk memberikan tanggung jawab kepada individu untuk menilai sendiri ketersediaan makanan, disertai dengan informasi potensi kekurangan. Gubernur Sudah menanggapi keadaan ini dengan langkah proaktif, merencanakan

[40] "Rijstschaarschte."

[41] *Ibid*.

[42] *Ibid*.

pembentukan sebuah komisi yang akan secara menyeluruh memeriksa dan mengelola ketersediaan serta harga makanan.[43]

Lid Volksraad, yang diketuai oleh Tuan Stibbe, Residen di Pekalongan, berkolaborasi dengan Cokroaminoto dalam komisi tersebut. Ordonansi baru diperkenalkan untuk memberikan wewenang kepada para residen, memungkinkan mereka menetapkan harga barang-barang makanan. Proaktif dalam sikapnya, Kepala Negeri mulai menghadapi tekanan untuk memastikan ketersediaan pangan, terutama setelah melihat berita kelaparan di Surabaya. Pemerintah juga terlibat secara aktif dalam inspeksi menyeluruh terhadap persediaan makanan di berbagai lokasi. Melibatkan guru-guru untuk membantu dalam upaya pemeriksaan ini, menunjukkan kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi potensi krisis pangan. Semua langkah ini diambil dengan harapan dapat mengantisipasi dan mencegah ancaman kelaparan yang mungkin timbul.[44]

Pada bulan Januari, artikel dalam koran Sinar Hindia mencatat penetapan harga beras di Semarang. Disebutkan bahwa hasil dari konferensi komisi yang mempunyai wewenang terhadap persediaan makanan pada tanggal 10 Januari 1919 menetapkan harga untuk beras Siamtjiam 16 Gulden per pikul, lalu beras Jawa Theo Kee nomor satu, dua, dan tiga seharga 14-16 Gulden per pikul. Kemudian untuk harga beras Lamliap, Lamtjiam, Siooka dipukul rata seharga 14,50 Gulden per pikul. Beras Menir A seharga 13,50 Gulden per pikul, lalu Menir C1 dan C3 seharga 12,75 Gulden per pikul. Terakhir harga beras Poakangdjoo atau beras merah ditetapkan dengan harga 12 Gulden per pikul. Untuk setiap penjualan eceran, para penjual diperbolehkan untuk mengambil keuntungan sebanyak 0,50 Gulden dari harga yang sudah ditetapkan. Aturan tersebut akan dijalankan di seluruh wilayah Semarang, tetapi akan dipertimbangkan dahulu kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda.[45]

3. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada masa krisis beras 1918-1921 di Hindia Belanda cenderung tidak efektif dan justru berdampak merugikan serta memiskinkan masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, termasuk intervensi harga, distribusi beras, dan langkah-langkah ekonomi lainnya, namun masih terdapat kekurangan yang signifikan.

Pertama, kebijakan pemerintah cenderung terlambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Hal ini terlihat dari lambannya respon dalam mengatasi kelangkaan beras dan memperbaiki infrastruktur yang menyebabkan ketidakstabilan pasokan.

Kedua, kebijakan tersebut rentan terhadap penyelewengan dan korupsi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Spekulasi harga dan kelangkaan bahan makanan merupakan dampak langsung dari kegagalan sistem distribusi yang rentan terhadap praktik-praktik tidak etis.

Ketiga, pemerintah membeli padi dari para petani untuk menimbun stok beras yang hanya dikeluarkan untuk pemerintah saja, mengakibatkan terhambatnya aliran beras ke pasar dan meningkatnya ketidakstabilan harga, sehingga merugikan masyarakat luas.

---

[43] "Kekoerangan Makanan," *Sinar Hindia* (Semarang, Desember 1918).

[44] *Ibid*.

[45] "Voorloopig Penetapan Harga Beras Di Semarang," *Sinar Hindia* (Semarang, January 11, 1919), 2.

Terakhir, kebijakan pemerintah cenderung tidak memperhitungkan dampak sosial yang signifikan dari krisis tersebut. Masyarakat yang paling rentan, seperti petani kecil dan pekerja urban, menjadi korban utama dari kebijakan yang tidak memadai.

Dengan demikian, penting untuk mengambil pelajaran dari masa lalu dan memperbaiki pendekatan kebijakan dalam menghadapi krisis serupa di masa depan. Kebijakan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah dampak yang merugikan dan memiskinkan seperti yang terjadi pada masa krisis beras di Hindia Belanda.

Daftar Pustaka

"Staatblad van Nederlandsch-Indie No. 166." De gouverneur- Generaal van Nederlandsch-Indie, March 30, 1918.

"27 Wagon Beras Lari Dari Banyuwangi." Neratja. Batavia,May 30, 1921."Bahaj Kemahalan."Sinar Hindia. Semarang, January 7, 1919.

"Beras Mahal." Sinar Hindia. Semarang, February 12, 1919.

"De Rijstschaarschte." Bataviaasch Nieuwsblad. Batavia, November 22, 1919.

"De Rijst-Schaarschte." Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch- Indie. Batavia, June 11, 1919.

"De Voedselvoorziening van Java." De Indier. Den Haag, May 1, 1918. "Djoeal Anak." Sinar Hindia. Semarang, Desember 1918.

"Duurte En Rijstschaarschte." De Locomotief. Semarang, January 25, 1918. "In Dagen va Rijstschaarschte." De Locomotief. Semarang, January 24, 1919.

"Kekoerangan Makanan." Sinar Hindia. Semarang, Desember 1918. "Melarat Sangat." Sinar Hindia. Semarang, December 12, 1918.

"Membantu Rakyat." Neratja. Batavia, July 15, 1921, 5 edition. "Riboet Koerang Beras."Sinar Hindia. Semarang, February 24, 1919. "Rijst Voor Indie." De Locomotief. Semarang, August 2, 1918.

"Rijstschaarschte." Bataviaasch Nieuwsblad. Batavia, May 28, 1920.

"Rijstschaarschte." De Nieuwe Vorstenlanden. Semarang, May 2, 1918.

"Rijst-Schaarschte." Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indie.Batavia, December 9, 1919.

"Roedjak Woeni Dari Magelang." Sinar Hindia. Semarang, February 13, 1919.

"Voedselvoorziening." Algemeen Handelsblad. Rotterdam, November 8, 1919.

"Volksraad Persidangan Sabtu 9 Juli." Neratja. Batavia, July 16, 1921.

"Voorloopig Penetapan Harga Beras Di Semarang." Sinar Hindia. Semarang, January 11, 1919.

Dijk, Kees van. The Netherlands Indies and The Great War 1914-1918. Leiden: KITLV Press, 2007.

J. v. Limburg. "Staatblad van Nederlandsch-Indie No. 82." De gouverneur- Generaal van Nederlandsch-Indie, 1920.

Khudori. Ironi Negeri Beras. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.

M.B. Smits. De Rijstinvoer in Nederlandsch-Indie. Weltevreden: Departement van Landbouw, 1928.

Muhammad Dinar and Muhammad Hasan. Pengantar Ekonomi : Teori Dan Aplikasi. Sulawesi Selatan: Pustaka Taman Ilmu, 2018.

Smits, M. B. De Rijstinvoer In Nederlandsch-Indie. Weltevreden: Landsdrukkerij, 1928.

Zoetmulder, P.J. Kalangwan : Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang. Jakarta: Djambatan, 1983.